



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		DAERAH TIDAK TERPENCIL ¹⁾	DAERAH TERPENCIL ²⁾	JUMLAH
1	Aceh	463.066.040.000	-	463.066.040.000
2	Sumatera Utara	1.540.512.940.000	-	1.540.512.940.000
3	Sumatera Barat	552.263.610.000	-	552.263.610.000
4	Riau	648.146.530.000	-	648.146.530.000
5	Kepulauan Riau	174.662.360.000	-	174.662.360.000
6	Jambi	341.454.970.000	-	341.454.970.000
7	Sumatera Selatan	805.514.020.000	-	805.514.020.000
8	Kepulauan Bangka Belitung	131.299.480.000	-	131.299.480.000
9	Bengkulu	204.707.510.000	-	204.707.510.000
10	Lampung	751.815.680.000	-	751.815.680.000
11	DKI Jakarta	723.598.720.000	-	723.598.720.000
12	Jawa Barat	4.018.249.980.000	-	4.018.249.980.000
13	Banten	1.008.829.420.000	-	1.008.829.420.000
14	Jawa Tengah	2.676.590.470.000	-	2.676.590.470.000
15	DI Yogyakarta	274.300.540.000	-	274.300.540.000
16	Jawa Timur	2.783.219.410.000	-	2.783.219.410.000
17	Kalimantan Barat	555.369.350.000	-	555.369.350.000
18	Kalimantan Tengah	254.101.360.000	29.446.160.000	283.547.520.000
19	Kalimantan Selatan	328.593.450.000	-	328.593.450.000
20	Kalimantan Timur	351.631.430.000	-	351.631.430.000
21	Kalimantan Utara	72.981.440.000	-	72.981.440.000
22	Sulawesi Utara	269.266.300.000	-	269.266.300.000
23	Gorontalo	126.846.030.000	-	126.846.030.000
24	Sulawesi Tengah	343.285.200.000	-	343.285.200.000
25	Sulawesi Selatan	922.401.630.000	-	922.401.630.000
26	Sulawesi Barat	158.450.380.000	-	158.450.380.000
27	Sulawesi Tenggara	312.101.440.000	-	312.101.440.000
28	Bali	380.385.340.000	-	380.385.340.000
29	Nusa Tenggara Barat	459.073.400.000	-	459.073.400.000
30	Nusa Tenggara Timur	716.042.300.000	-	716.042.300.000
31	Maluku	18.652.470.000	208.654.260.000	227.306.730.000
32	Maluku Utara	57.206.290.000	97.686.430.000	154.892.720.000
33	Papua	-	345.040.400.000	345.040.400.000
34	Papua Barat	124.213.930.000	-	124.213.930.000
	Total	22.548.833.420.000	680.827.250.000	23.229.660.670.000

Catatan:

¹⁾ BOS untuk daerah tidak terpencil akan ditransfer per triwulan sebesar 1/4 (satu perempat) dari alokasi BOS

²⁾ BOS untuk daerah terpencil akan ditransfer per semester sebesar 1/2 (satu perdua) dari alokasi BOS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI ... ⁽¹⁾
TRIWULAN ... ⁽²⁾

Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. : Rp ⁽³⁾
Triwulan sebelumnya

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Triwulan I			: Rp	(4) = (5)+(6)+(7)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(5)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(6)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(7)		
- Triwulan II			: Rp	(8) = (9)+(10)+(11)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(9)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(10)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(11)		
- Triwulan III			: Rp	(12) = (13)+(14)+(15)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(13)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(14)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(15)		
- Triwulan IV			: Rp	(16) = (17)+(18)+(19)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	(17)		
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	(18)		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	(19)		
- Jumlah			: Rp	(20) = (4)+(8)+(12)+(16)

Realisasi Penyaluran BOS ke Satuan Pendidikan Dasar melalui SP2D Provinsi

- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya	: Rp	(21)
- Triwulan ini	: Rp	(22)
- Kumulatif s.d Triwulan ini	: Rp	(23) = (21)+(22)
- Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	: Rp	(24) = (3)+(20)-(23)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ⁽²⁵⁾, Tanggal ⁽²⁶⁾
Gubernur ⁽²⁷⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁸⁾

Nama ⁽²⁹⁾



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi.
2	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya.
4	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I. (5)+(6)+(7)
5	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
6	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
7	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
8	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (9)+(10)+(11)
9	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
10	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
11	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
12	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (13)+(14)+(15)
13	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
14	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
15	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
16	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III. (17)+(18)+(19)
17	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
18	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
19	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN
20	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV. (4)+(8)+(12)+(16)
21	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan) ke satuan pendidikan dasar s.d. triwulan sebelumnya.
22	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke satuan pendidikan dasar pada triwulan berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2014 pada triwulan berkenaan/lampiran IV.
23	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS ke satuan pendidikan dasar. (21)+(22)
24	Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. (3)+(20)-(23)
25	Diisi tempat dibuatnya laporan.
26	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
27	Diisi nama jabatan.
28	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
29	Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur menyatakan telah merealisasikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah pada Triwulan dalam Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Gubernur

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DARI REKENING KAS UMUM NEGARA KE REKENING KAS UMUM DAERAH

A. Alokasi BOS Daerah Tidak Terpencil	:	400.000.000.000,00
B. Alokasi BOS Daerah Terpencil	:	100.000.000.000,00
C. Sisa BOS TA 2013 di RKUD	:	50.000.000,00
D. Penyaluran BOS Daerah Tidak Terpencil Triwulan I	:	100.000.000.000,00
E. Penyaluran BOS Daerah Terpencil Semester I	:	50.000.000.000,00
F. Penyaluran BOS Triwulan II	:	100.000.000.000,00
G. Penyaluran BOS Daerah Tidak Terpencil Triwulan III	:	100.000.000.000,00
H. Penyaluran BOS Daerah Terpencil Semester II	:	50.000.000.000,00
I. Penyaluran BOS Triwulan IV	:	100.000.000.000,00
J. Penyaluran Kurang Bayar BOS Triwulan IV	:	40.000.000,00
K. Jumlah Penyaluran BOS (D+E+F+G+H+I+J)	:	500.040.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN I

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan I	Rp	100.000.000.000,00	
Potongan Lebih Salur BOS TA 2013	Rp	50.000.000,00	-
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan I (Netto)	Rp	99.950.000.000,00	
BOS Daerah Terpencil yang telah diterima RKUD pada Semester I		50.000.000.000,00	
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan I	Rp	150.000.000.000,00	

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN I

<div>KOP KEPALA DAERAH</div>			
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI ... TRIWULAN I			
Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	50.000.000,00	
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan II	Rp	-	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan III	Rp	-	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan IV	Rp	-	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Jumlah	Rp	149.950.000.000,00	
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi			
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	-	
- Triwulan ini	Rp	150.000.000.000,00	
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	150.000.000.000,00	
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp	-	
Tempat, Tanggal Gubernur ... (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN II

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00
Potongan Lebih Salur BOS Triwulan I	Rp	- -
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan II (Netto)	Rp	100.000.000.000,00
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan II	Rp	99.900.000.000,00

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN II

<div>KOP KEPALA DAERAH</div>		
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI ... TRIWULAN II		
Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	50.000.000,00
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan III	Rp	-
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan IV	Rp	-
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Jumlah	Rp	249.950.000.000,00
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi		
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	150.000.000.000,00
- Triwulan ini	Rp	99.900.000.000,00
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	249.900.000.000,00
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp	100.000.000,00
Tempat, Tanggal Gubernur ...		
(tanda tangan asli dan stempel basah)		
Nama		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN III

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan III	Rp	100.000.000.000,00	
Potongan Lebih Salur BOS Triwulan II	Rp	100.000.000,00	-
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan III (Netto)	Rp	99.900.000.000,00	
BOS Daerah Terpencil yang telah diterima RKUD pada Semester II	Rp	50.000.000.000,00	
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan III	Rp	150.100.000.000,00	

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN III

<div>KOP KEPALA DAERAH</div>			
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI ... TRIWULAN III			
Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	150.000.000,00	
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan III	Rp	149.900.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.900.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan IV	Rp		
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp		
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Jumlah	Rp	399.850.000.000,00	
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi			
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	249.900.000.000,00	
- Triwulan ini	Rp	150.100.000.000,00	
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	400.000.000.000,00	
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp		-
Tempat, Tanggal Gubernur ... (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN IV

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan IV	Rp	100.000.000.000,00
Potongan Lebih Salur BOS Triwulan III	Rp	- -
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan IV (Netto)	Rp	100.000.000.000,00
Penyaluran Kurang Bayar BOS Triwulan IV	Rp	40.000.000,00
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan IV	Rp	100.040.000.000,00

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN IV

KOP KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI ...
TRIWULAN IV

Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	150.000.000,00
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan III	Rp	149.900.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.900.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan IV	Rp	100.040.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	40.000.000,00
- Jumlah	Rp	499.890.000.000,00
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi		
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	400.000.000.000,00
- Triwulan ini	Rp	100.040.000.000,00
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	500.040.000.000,00
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp	-

Tempat, Tanggal
Gubernur ...

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR DAERAH OTONOM BARU

No.	Daerah Otonom Baru	Provinsi	Daerah Induk
1	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Timur
2	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	Kab. Ciamis
3	Kab. Pesisir Barat	Lampung	Kab. Lampung Barat
4	Kab. Manokwari Selatan	Papua Barat	Kab. Manokwari
5	Kab. Pegunungan Arfak	Papua Barat	Kab. Manokwari
6	Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat
7	Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu
8	Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju
9	Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan
10	Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula
11	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim
12	Kab. Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka
13	Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali
14	Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe
15	Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

